

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur melibatkan kegiatan kriminal yang mengancam integritas fisik merendahkan, dan psikologi anak yang melibatkan penyelundupan anak untuk tujuan ilegal. Salah satu bentuk pelanggaran hak-hak anak adalah eksploitasi seksual komersial anak ialah pelacuran anak, pornografi, dan perdagangan anak yang bertujuan untuk seksual dan mendapatkan uang. Dalam industri seks legal, anak-anak diculik dan dijual sebagai pekerja paksa (Michael B. Mukasey & Cybele K. Daley, 2007). Dengan harapan memberikan kehidupan yang sangat layak kepada anak-anaknya, beberapa keluarga miskin menjual anak-anak mereka kepada pedagang manusia.

Negara-negara dikawasan asia tenggara mereka biasanya akan memanfaatkan anak-anak muda secara fisik untuk keuntungan finansial. Ketika kerabat atau orang terdekat secara fisik melecehkan seorang anak yang diasuh disaat itu lah berawalnya pola pelecehan. Secara alami, hal ini dapat mengakibatkan aktivitas seksual yang terus menerus dan bahkan penyebaran video atau gambar asusila secara online. Mayoritas dari mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia menargetkan anak-anak yang tampaknya melarikan diri tanpa penghasilan atau tanpa memiliki kemampuan bekerja. Dalam hal memerangi Eksploitasi Seksual

Komersial Anak penggunaan sistem peradilan pidana akan dibentuk secara khusus yang terorganisir (U.S. Department of Justice, 2007).

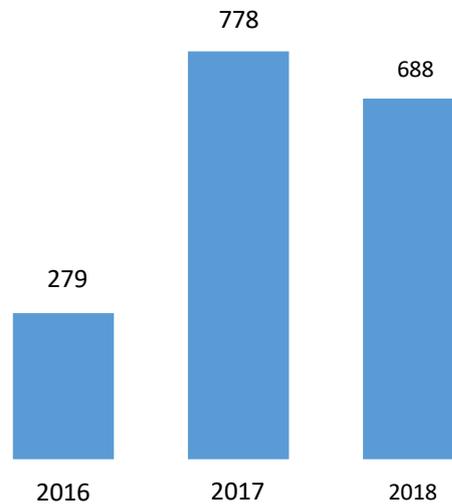
Sebagian besar kasus eksploitasi seksual komersial anak yang telah terdata melibatkan perempuan muda dengan kurang dari sepertiga dari kasus tersebut melibatkan laki-laki muda. Namun, angka-angka ini mungkin menunjukkan bahwa laki-laki cenderung mengabaikan bahaya karena mereka lebih kecil kemungkinannya dibandingkan perempuan untuk berbagi pengalaman mereka dengan eksploitasi seksual komersial dan pengalaman ini diakui oleh orang lain. Anak-anak dan remaja dari latar belakang minoritas dan kulit hitam biasanya cenderung lebih besar menjadi faktor isu tersebut. Oleh karena itu, eksploitasi seksual komersial anak tidak boleh dilihat secara terpisah dari bentuk pelecehan seksual lainnya. Sesuai dengan pedoman, segala bentuk bahaya pada masa anak-anak dan remaja harus ditangani secara tuntas dan cepat (Alderson, 2016).

*British Columbia Report and Sexual Exploitation of Adolescents* menyatakan bahwa 10% hingga 15% pelacur didominasi berusia dibawah 18 tahun (Preventing Sexual Exploitation of Children and Youth, 2022). Anak-anak yang latar belakangnya memiliki keluarga yang mempunyai penyakit mental, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat terlarang hingga alkohol atau bahkan pelecehan seksual fisik termasuk diantara mereka yang paling rentan berisiko. Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk lain dari wisata seks anak dan banyak dari kasus tersebut yang datanya belum teridentifikasi. Di negara-negara maju kekerasan terhadap anak-anak dibawah umur terkait dengan eksploitasi seksual adalah hal yang sangat biasa. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berisiko mengalami sejumlah masalah kesehatan mental dan fisik, termasuk salah

satunya depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma, disosiasi, dan tingkat bunuh diri. Tingkat kecanduan diantara anak-anak yang dieksploitasi juga tinggi bahkan rentan sekali terkena penyakit menular infeksi seperti seperti gonore, sifilis, HIV, atau hepatitis B atau C (Marie D. 2004).

Bangladesh merupakan negara dikawasan asia selatan yang dikenal dimana memiliki isu kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang bisa dikatakan persentasenya sangatlah relatif tinggi bahkan dari tahun ke tahun masalah ini terus meningkat, anak-anak yang dibawah umur sering kali menjadi korban kekerasan fisik. Menempati peringkat ke-12 di dunia menjadikan Bangladesh salah satu negara dengan tingkat ancaman terhadap perempuan tertinggi. Kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh telah berlangsung selama beberapa dekade atau abad dan telah dibentuk oleh faktor sosial dan agama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemiskinan yang merajalela dan keterbelakangan Bangladesh (Ningsih & Afriansyah, 2022).

**Tabel 1.1 Jumlah kasus perdagangan anak di Bangladesh tahun  
2016-2018**



Sumber: (Asia, 2020) (Of & People, 2011).

Dari data diatas menjelaskan bahwa angka kasus perdagangan anak dibawah umur mengalami naik turun yang dimana bisa dikatakan kurang efektifnya pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Kepolisian Bangladesh melaporkan masing-masing 279 pada tahun 2016, 778 dan 668 kasus perdagangan manusia per tahun dari 2017 hingga 2018 kasus yang terjadi (Report & In, 2022).

Bangladesh merupakan Negara yang berhak mendapat perhatian khusus karena tingginya kasus eksploitasi komersial tersebut. Kejahatan perdagangan manusia dari India, Nepal, Pakistan, Sri lanka, dan Bhutan melakukan transit melalui Bangladesh. Hal tersebut berdampak banyak pada kasus perdagangan manusia yang sebagian besar disebabkan oleh ketimpangan sosial dan kondisi politik yang kurang kondusif sehingga membuat pemerintah tidak fokus pada kebijakan terkait. Kasus perdagangan manusia ini membuat perdagangan manusia begitu meluas, karena keadaan kemiskinan tersebut orang awam di Bangladesh

tidak punya pilihan selain melakukan praktik tersebut. Akibatnya, jumlah penduduk negara itu meningkat 20% dari 130 juta jiwa menjadi 156 juta jiwa. Yang dimana membuat kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan internasional semakin marak. Keuntungan perdagangan manusia yang tinggi dan hukuman yang rendah membuatnya lebih menarik bagi para pelaku dan kejahatan yang sangat terorganisir di Bangladesh. Perempuan dan anak dibawah umur diselundupkan ke pusat perdagangan manusia oleh para pelaku atau sindikat di 20 titik transit dan di 16 distrik. Semua korban melakukan kerja paksa serta eksploitasi seksual. Sejumlah titik transit baru juga ditemukan digunakan untuk menyelundupkan orang dari Bangladesh ke negara-negara di Asia Tenggara dan Selatan melalui jalur air (Damayanti, 2020).

Pernikahan dini dan paksa merupakan bentuk dan jalur eksploitasi seksual anak. Tingginya tingkat pernikahan anak di Bangladesh cenderung membuat anak-anak rentan terhadap berbagai kejahatan eksploitasi seksual. Data dari periode 2014-2020 menunjukkan 51% wanita berusia antara 20 dan 24 tahun menikah pada usia 18 tahun dan 15% pada usia 15 tahun. Meskipun undang-undang larangan pernikahan anak di Bangladesh diberlakukan pada tahun 2017, namun undang-undang tersebut memiliki pengecualian yang mengizinkan anak-anak menikah dalam keadaan khusus dengan izin orangtua mereka. Pada akhirnya undang-undang saat ini mengizinkan pelaku yang memperkosa dalam pernikahan untuk tidak dihukum bahkan jika istrinya berusia lebih dari 13 tahun (ECPAT, 2020a).

Menurut data survei tahun 2018 yang dilakukan organisasi non-pemerintah BLAST dan *Save the Children* menemukan bahwa 52% ibu dari total 400 rumah tangga percaya bahwa menghukum anak secara fisik ketika melakukan kesalahan

perbuatan yang dibenarkan bahkan selain itu pembunuhan anak sangat menjadi perhatian di Bangladesh. Menurut *The World Bank Report* di Bangladesh kemiskinan semakin menurun hal ini menandakan kemakmuran yang dialami masyarakat di Bangladesh, akan tetapi saat pandemi COVID-19 menyebabkan angka tersebut meningkat kembali berawal dari 14,3% menjadi 18,1% pada tahun 2020. Dapat dilihat hal ini menunjukkan kalau lebih dari 29 juta orang di Bangladesh hidup dalam kemiskinan yang cenderung tinggi dan mengakibatkan risiko yang lebih tinggi terhadap anak dieksploitasi secara seksual, pernikahan dini, dan perdagangan manusia (Morag, 2011).

Di Bangladesh mayoritas perempuan dan anak-anak adalah korban dari kemiskinan karena bangladesh ialah salah satu negara miskin di asia selatan. Menurut *The Annual Report of an Organization*, hampir 200.000 perempuan dan anak Bangladesh dijual ke pakistan dan bahkan dalam laporan tahun 2009 di Bangladesh pemetaan anak-anak dan perempuan yang hilang, diculik, dan diperdagangkan. *Organization of Migrant (IOM)* mengidentifikasi masalah perdagangan anak dan perempuan sebagai perhatian khusus di Bangladesh, pada sebuah seminar pada tahun 2010 yang disebut “Berbagi tingkat nasional untuk penerapan undang-undang yang komprehensif melawan orang yang diperdagangkan” sekitar 1.311 perempuan dan anak-anak yang telah diperdagangkan antara tahun 2004 dan 2010 mencapai 730 perempuan dan 581 anak-anak (Bangladesh, n.d.).

Bangladesh telah mengambil tindakan signifikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bangladesh meluncurkan *Multisectoral Program on Violence Against Women (MSPVAW)* dan Rencana Aksi Nasional yang

komprehensif untuk mencegah kekerasan terhadap anak dalam kerjasama dengan pemerintah Denmark pada tahun 2000. Rencana aksi nasional terkenal di Asia Selatan karena presentasinya yang komprehensif tentang masalah perlindungan, pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi yang penting dan untuk secara langsung menangani pelecehan eksploitasi seksual non-komersial. Membahas sejumlah isu yang penting bagi anak dibawah umur seperti langkah-langkah untuk menghadapi risiko migrasi, pelecehan oleh staf badan perumahan, mekanisme pelaporan pelecehan, pembentukan “tempat berlindung yang aman” untuk anak-anak yang berisiko, dan prosedur penegakan yang ramah (Frederick, 2010). Selain itu, Nari-o-Shishu Nirjatan Daman Ain (undang-undang pencegahan penindasan perempuan dan anak) tahun 2000 diberlakukan di Bangladesh untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak dibawah umur. “Masyarakat tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025” adalah tujuan dari program tersebut membuat rencana nasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (2013-2025). Perlindungan hukum, kepedulian sosial, peningkatan status sosial ekonomi perempuan, bantuan rehabilitasi, perlindungan, Kerjasama lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi fokus utama. Pada tahun ini proyek tersebut memasuki tahap ketiga dan terakhir pelaksanaannya. Program ini terdiri dari sejumlah tindakan intervensi yang signifikan, termasuk pembentukan sembilan pusat krisis satu atap dirumah sakit besar, sel krisis satu atap dimasing-masing 67 distrik di Bangladesh, pusat konseling trauma nasional di Dhaka yang dimana memberikan bantuan nasional untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak 24 jam, dan database yang

mengumpulkan data dari semua institusi (Human Rights Watch (Organization), 2020).

*End Child Organization Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose* (ECPAT) ialah organisasi dunia yang concern terhadap isu eksploitasi seksual komersial pada anak. ECPAT merupakan *Non-Government Organization* yang partisipannya terdiri dari negara dan anggota masyarakat umum. Departemen atau badan pemerintahan mewakili negara, sementara anggota masyarakat sipil dapat berupa organisasi. Kesadaran akan penderitaan korban eksploitasi dan perdagangan manusia dapat terbantu melalui ECPAT dengan memiliki jaringan global di 95 negara. Penelitian, pelatihan, partisipasi pemuda, dan advokasi adalah beberapa program berkelanjutan yang akan ditawarkan organisasi untuk mengarahkan upaya kampanye tersebut. Dengan adanya anak yang terlibat dibawah umur sebagai objek, ECPAT yang berawal nya hanya sebuah gerakan yang terinspirasi dari sekelompok orang atau aktivis yang peduli terhadap isu eksploitasi seksual, Dimana hal tersebut menjadikan ECPAT sebagai *activity leader* dikarena perannya sangat signifikan dalam menangani isu eksploitasi seksual anak sesuai dengan visi dan misinya (Fitrianty & Fauzi, 2017).

ECPAT yang berawal didirikan oleh aktivis dan peneliti hak anak sebagai kampanye tiga tahun untuk mengakhiri “pariwisata seks”. Dengan memiliki fokus dinegara kawasan Asean terutama Thailand khususnya, dibentuk pada tahun 1990 sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri prostitusi anak di Asia. Dengan cara mengumpulkan data, penelitian, dan analisis berkualitas tinggi. Organisasi tersebut terus membangun organisasi yang membantu, memperluas jangkauan

geografisnya, dan mendapatkan pengalaman dengan advokasi ditingkat regional, nasional, dan internasional (International, 2022).

Jaringan ECPAT mencakup sekitar 62 grup dari 50 negara saat ini. ECPAT yang berawal hanya memiliki sekitar 17 grup pada tahun 1996, meningkat menjadi 53 grup pada tahun 1999. Pada awal tahun 2000 an ECPAT hadir di hampir setiap wilayah didunia terhitung 15 kelompok di Eropa Barat, 6 di Eropa Timur, 9 di Afrika, 15 di Asia, 3 di Pasifik, 4 di Amerika Utara, dan 10 di Amerika Latin. Organisasi yang menjadi bagian dari ECPAT sangat beragam misalnya Sebagian besar bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat sementara lainnya hanya individu atau perorangan.

Secara umum organisasi ini juga menjalankan misinya dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada beberapa negara yang belum meratifikasi konvensi hak anak dan protokol-protokol pilihannya, serta sejumlah perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan masalah perdagangan anak dibawah umur \atau eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). ECPAT memiliki sejumlah program untuk anak dibawah umur antara lain pencegahan, rehabilitasi, hingga program perlindungan dan juga secara teratur bekerjasama dengan negara-negara yang bermasalah dengan eksploitasi seksual untuk membantu dan menyembuhkan anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual (Auliarini, 2016).

Untuk mencapai tujuannya mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak-anak di Bangladesh, ECPAT Bangladesh bekerja sama dengan berbagai mitra dan organisasi. Untuk menjamin hak-hak anak dihormati dan ditegakan, bekerja sama erat dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor wisata. Selain itu,

bekerja sama dengan jaringan ECPAT internasional lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan mendorong peraturan dan kebijakan yang lebih ketat dan juga organisasi bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan organisasi perburuhan internasional untuk menjamin hak-hak anak dilindungi.

Salah satu faktor dari permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran akan permasalahan eksploitasi seksual komersial anak yang membuat hal ini terjadi begitu signifikan di Bangladesh. Dengan keterbatasan pemerintah di Bangladesh dalam menanggulangi isu-isu eksploitasi seksual komersial anak tersebut, pemerintah Bangladesh dalam hal ini bekerja sama dengan *non-government organization* (NGO) salah satunya ECPAT dalam memberantas eksploitasi yang terjadi di Bangladesh. Data dari ECPAT memperkirakan jumlah korban perdagangan manusia setiap tahunnya terus meningkat menjadi 500.000. Pemerintah Bangladesh berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan peraturan undang-undang yang melindungi perempuan dan eksploitasi seksual serta memperluas pengawasan. Adapun upaya pemerintah Bangladesh salah satunya di bidang pencegahan, perlindungan, penyelamatan, dan rehabilitasi telah dilakukan, namun masih belum ada kemajuan yang signifikan dalam menangani bentuk eksploitasi seksual.

Baik hukum nasional maupun internasional mewajibkan Bangladesh untuk melindungi dan memajukan kepentingan anak-anak. Undang-undang dasar pendidikan diberlakukan di Bangladesh oleh pemerintah pada tahun 1990 dan pada tahun 1993, serta sistem pendidikan dasar wajib untuk anak-anak di atas enam tahun didirikan. Hak jaminan konstitusi Bangladesh pada tahun 1974 kebebasan

serta jaminan umum yang esensial dan kebijakan pemerintah tentang minoritas dalam masyarakat kepada anak dibawah umur. Hak-hak ini bertujuan sebagai panduan untuk perumusan kebijakan dan undang-undang untuk melindungi perkembangan bebas anak dari pekerjaan yang tidak aman serta ancaman-ancaman lainnya. Akibatnya, pemerintah Bangladesh pada awalnya menerapkan sejumlah rencana dan kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan yang setara dan inklusif (Kuddus & Rahman, 2017).

Konvensi hak-hak anak telah diratifikasi oleh Bangladesh seperti protokol perdagangan anak, pelacuran anak, dan pelecehan anak. Tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, konvensi ILO 182 dan konvensi SAARC menentang perdagangan anak dibawah umur untuk pelacuran. Ini menegaskan kembali kesepakatan di Yokohama pada tahun 2001 dan mengadopsi Deklarasi Stockholm dan Agenda Aksi menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak dibawah umur pada tahun 1996. Namun Bangladesh belum menandatangani Protokol Palermo yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah, memerangi, dan menghukum perdagangan manusia khususnya perdagangan anak-anak dan perempuan (Frederick, 2010).

Adapun upaya yang dilakukan ECPAT sejauh ini adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk LSM lokal di Bangladesh. Organisasi tersebut adalah Aparajeyo Bangladesh yang dimana organisasi ini berfokus terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kesusahan yang terjadi akibat kehidupan yang tidak memadai. Berikut nya adalah organisasi Ain o Salish Kendra (ASK) untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia yang kurang beruntung melalui

aktivisme komunitas. Terakhir adalah the Association for Community Development's (ACD's) untuk melindungi hak-hak anak dibawah umur. Dan tiga LSM penting lainnya turut terlibat dalam aktivitas kesadaran tentang pelecehan seksual anak yaitu *Action Against Trafficking and Sexual Exploitation of Children (ATSEC)*, *Girls Child Advocacy Forum* dan *Bangladesh National Women's Lawyer's Association (BLWLA)*. Melalui poster, stiker, dan brosur adalah beberapa materi campaign untuk pencegahan yang mereka bagikan kepada anak-anak, remaja, dan orang tua. Mereka juga menggunakan teater jalanan sebagai bentuk ekspresi untuk campaign yang mereka jalankan. (Bangladesh, n.d.)

ECPAT juga melakukan kolaborasi bersama salah satu perusahaan multinasional yaitu the body shop. The body shop sendiri merupakan perusahaan kosmetik untuk kulit dan tubuh yang berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan lingkungan. The body shop mengenali isu terhadap masalah eksploitasi seksual tersebut dan memilih ECPAT sebagai mitra untuk memerangi isu eksploitasi seksual komersial internasional terhadap anak. Komitmen perusahaan ini terhadap tujuan kemanusiaan tidak biasa bagi perusahaan komestik dan bahkan jarang terjadi terutama ketika dua faktor dengan tujuan berbeda berkolaborasi. Misalnya seperti LSM lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang sama sekali tidak peduli dengan keuntungan, sedangkan perusahaan multinasional adalah pelaku yang peduli dengan keuntungan (Salsabila, 2013).

Program "*Stop Sex Trafficking in Children and Young People*" yang diluncurkan ECPAT dan perusahaan the body shop pada tahun 2009 karena eksploitasi seksual komersial anak dibawah umur yang tidak dapat ditoleransi. Dalam program ini sejumlah pihak yang memiliki pengaruh signifikan termasuk

pemerintah dan generasi muda yang peduli dengan isu eksploitasi seksual komersial anak terlibat. Program tersebut berhasil selama 3 tahun melibatkan lebih dari 7 juta orang dan telah berjalan dengan baik. kampanye ini terdiri dari tiga tahap yaitu advokasi, Pendidikan, dan penggalangan dana. Pada tahun pertama, dari tahun 2009 hingga 2010 kampanye difokuskan untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang eksploitasi seksual komersial anak. Tahun berikutnya, khusus untuk dapat lebih melibatkan masyarakat secara penuh dalam advokasi dengan petisi kampanye yang meminta agar pemerintah mengintensifkan upaya memerangi perdagangan anak. Tahun ketiga, dari 2011 hingga 2012 untuk memeriksa hasil kampanye tersebut dan menindaklanjuti petisi dan ajakan bertindak ke negara bagian (Iv et al., 2012).

Adapun bentuk program ECPAT lainnya adalah "*Youth Partnership Program (YPP)*". Bekerjasama dengan para pemuda di Asia Selatan yang dimana membangun proyek inovatif yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas anak-anak muda untuk terlibat dalam aktivitas pemberantasan aktivitas komersial seksual. *Youth Partnership Program* bersama para pemuda yang terlatih yang ada di Bangladesh, India, dan Nepal untuk menerapkan program pendampingan dari sekolah ke sekolah kedaerah yang dimana rawan terjadinya eksploitasi seksual untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan dan dukungan kepada anak-anak yang terjebak eksploitasi seksual (Badriyah, 2011). *Youth partnership Program* adalah program tentang bagaimana kaum muda yang rentan dan penyintas eksploitasi seksual komersial anak dapat berpartisipasi aktif dalam program, implementasi, pengambilan keputusan, dan pemantauan proyek demi keuntungan mereka. Hal ini menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil peran

kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan komunitas tempat mereka tinggal. Orang dewasa harus mengenali dan menghargai kemampuan anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam manajemen proyek untuk memfasilitasi partisipasi. Harus memastikan bahwa partisipasi dijamin disemua tahapan kehidupan, termasuk keluarga, sekolah dan masyarakat untuk anak-anak (Foundation, 2010).

YPP memberikan edukasi serta keterampilan dan pelatihan, yang memiliki tujuan untuk memimpin perjuangan melawan eksploitasi seksual komersial terhadap anak dibawah umur dan memanfaatkan kemampuan anak-anak dan remaja untuk menuntut hak-hak mereka sendiri yang sebagaimana mestinya. Pemuda yang terlibat dalam program YPP mempelajari keterampilan yang mereka perlukan untuk bagaimana menjadi diri mereka sendiri dan melindungi serta teman-teman mereka dengan berbagai macam cara. *Youth Led Trainings*, dimana pemuda mendapatkan pelatihan untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan mereka untuk memenuhi peran mereka sebagai *Youth Motivator*, *Peer Supporter*, dan *Youth Advocates*. Ini bertujuan untuk membantu mereka dalam mengembangkan kualitas dan keterampilan kepemimpinan sehingga mereka dapat membantu YPP dalam mempromosikan disekolah, tempat penampungan dan khalayak umum. *Youth Let Micro Project*, adalah sebuah proyek yang dirancang dan dijalankan oleh para remaja untuk menjelaskan undang-undang untuk melindungi anak dibawah umur dari eksploitasi dan kekerasan serta untuk meningkatkan kesadaran penuh akan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur. Melalui program yang disebut "*Micro Project*", YPP memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk proyek-proyek yang dipimpin oleh remaja. Proyek proyek ini menerima sumbangan dana mulai dari 500\$ hingga 1.500\$. Remaja dilatih dalam pemantauan dan advokasi

anak oleh staf kelompok internasional ECPAT dan mereka juga didukung dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan (Sari, 2017).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“UPAYA ECPAT SEBAGAI AKTOR TRANSNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI BANGLADESH”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya ECPAT melalui program “Global Youth Partnership Programme (YPP)” dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak di Bangladesh?”**

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis uraikan, maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini terhadap upaya ECPAT sejauh ini terhadap kasus eksploitasi seksual komersial anak, serta faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial anak di Bangladesh ditahun 2018 hingga 2021.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat faktor-faktor apa saja penyebab eksploitasi seksual komersial anak di Bangladesh.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ECPAT dalam mengatasi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak di Bangladesh.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan dari penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan mengenai topik Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Bangladesh dan bagaimana upaya *Non-Government Organization* (ECPAT) dalam menanganinya.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.